

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2010-2014 PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh :

Puspaningtyas Dyah Pramesthi- 14010111120021
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269
Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Pajak adalah salah satu penerimaan pendapatan pemerintah yang sangat penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna mengetahui naik atau turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sumber pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan pendapatan terbesar serta sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan mensejahterakan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, di Jawa Tengah penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup memberi sumbangan yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Kemampuan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang direncanakan dibandingkan dengan target pemungutannya berdasarkan potensi pajak kendaraan bermotor menggambarkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dijabarkan dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan teknik purpose sampling dengan melakukan wawancara dengan kepala bagian pajak dan bbn-kb dan pegawai pemungut pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah sudah efektif pada aspek penerimaannya, hal ini dibuktikan dengan presentase penerimaan pajak yang telah mencapai lebih dari seratus persen, dengan kata lain penerimaan sudah memenuhi target yang ditentukan. Tetapi secara prosesnya masih belum efektif, karena masih ada beberapa kendala eksternal seperti tingkat ekonomi masyarakat yang pas-pasan, kesadaran masyarakat yang masih rendah, banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor, adanya program low cost green car dan tidak adanya kenaikan objek kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Kata kunci : Sumber pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor, efektivitas.

ABSTRACT

Tax is one of the government income that is very important for the government to function, especially as a stabilizer economy through budget policy to know up or decline in the economic growth of an area. A source of revenue among other local taxes and levies which is expected to be a source of income and as the largest funding source of governance, regional development, community and prosper. One source of revenue from taxes the province is the motor vehicle tax, in Central Java the motor vehicles tax enough to make contributions to a large local revenue. The government the ability of central java province in realizing the motor vehicles tax planned compared with a target collection based on the potential of motor vehicle tax describe the effectiveness of tax collection of motor vehicles. This research elaborated with the qualitative method that will produce data descriptive, the purpose of this research is to know the effectiveness of tax revenue of motor vehicles as a source of revenue Central Java province. Researchers used a technique purpose of sampling to do an interview with the head of tax and bbn-kb and employees of tax collector. The result of research shows motor vehicle tax revenue in Central Java is effective from the perspective of the revenue collected, this is proven by the percentage of tax revenue has reached more than one hundred percent, in other words revenue enough to fulfill the target. But in the process is not effective, because there are still some obstacles such as the level of community external economic support, community awareness remain low, the number of motor vehicle stealing case, the implementation of the low cost of green car and the absence of the increase in motor vehicle object in Central Java .

Keywords : effectiveness, source of revenue, motor vehicle tax.

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan dana yang cukup besar sebagai modal untuk membiayai pengeluaran tetap proyek pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan nasional berwawasan Nusantara. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara efektif dan efisien.

Kemampuan keuangan disuatu daerah dapat terlihat dari besar kecilnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber-sumber yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut agar dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Berikut ini adalah pertumbuhan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Target dan Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	PAD		Pertumbuhan (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	3.899.414.357.000,00	4.417.869.229.526,00	-	-
2011	5.158.663.988.000,00	5.088.713.212.530,00	32,29%	15,18%
2012	6.289.094.295.000,00	6.044.043.900.457,00	21,91%	18,77%
2013	7.413.086.681.000,00	7.590.460.572.078,00	17,87%	25,58%
2014	9.097.476.269.000,00	8.965.185.303.687,00	22,72%	18,11%

Sumber : Biro Keuangan Bag.Pengelolaan Kasda dan Bid.Lahtabang DPPAD,diolah,2015

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Salah satu pajak Provinsi yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya populasi masyarakat disuatu daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang dana terbesar untuk Pajak Daerah dimana Pajak Daerah ini adalah komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Jawa Tengah.

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah salah satu indikator yang penting untuk mengetahui seberapa besar

sumbangan Pajak Daerah untuk Pendapatan Asli Daerah, serta untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembayaran pajak khususnya pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Semakin besar hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor, diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menghitung presentase pajak kendaraan bermotor yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Berikut ini adalah tabel kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 :

Tabel 1.2

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi PKB (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2010	1.544.313.644.030,00	4.417.869.229.526,00	34,95%	Cukup Baik
2011	1.755.017.905.667,00	5.088.713.212.530,00	34,49%	Cukup Baik
2012	2.024.106.323.231,00	6.044.043.900.457,00	33,49%	Cukup Baik
2013	2.330.853.999.740,00	7.590.460.572.078,00	30,71%	Cukup Baik
2014	2.587.269.029.100,00	8.965.185.303.687,00	28,86%	Sedang
		Rata-rata	32,50%	Cukup Baik

Sumber : Biro Keuangan Bag.Pengelolaan Kasda Provinsi Jawa Tengah dan DPPAD Bidang Lahtabang, Diolah.

Untuk terus meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah dapat mengatur strategi melalui kebijakannya sendiri sehingga dapat mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah dalam proses pemungutan pajak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2014 Provinsi Jawa Tengah**. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah, dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan proses dan pendekatan sasaran. Berdasarkan pendekatan tersebut penulis mencoba mengidentifikasi beberapa indikator yaitu responsivitas, responsibilitas, transparansi, akuntabilitas dan produktifitas.

Tabel 1.3
Indikator Evaluasi Kinerja

No	Kriteria	Penjelasan
1	Responsivitas	Seberapa besar respon pihak DPPAD dalam mengenali kebutuhan wajib pajak dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor?
2	Resposibilitas	Seberapabesarkesesuaianpelaksanaanpenerimaanpajakkendaraanbermotordenganaturatundang yang telah ditetapkan?
3	Transparansi	Bagaimanaketerbukaanpihak DPPAD dalam memberikaninformasikepadamasyarakatsehinggamampumembuatmasyarakatpercaya?
4	Akuntabilitas	Bagaimanabentukpertanggungjawabansecaravertikal dilakukanolehbawahankepadaatasandalamhalinipertanggungJawabandalambentuklaporan?
5	Produktifitas	Seberapa besar rasioantara input dan output yang didapat dari hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menganalisis dokumen dan arsip-arsip seperti laporan target dan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tahun 2010-2014 serta beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Penulis kemudian melakukan tahap selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data, alurnya dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penilaian terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan yang sangat penting dikarenakan dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan instansi yang terkait, dalam hal ini instansi yang terkait adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah (DPPAD), dalam mencapai misinya. Dengan cara melakukan penilaian terhadap efektifitas suatu instansi tersebut maka upaya untuk memperbaiki kinerja suatu instansi pemerintah bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas mengenai efektifitas Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor serta efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2010-2014 sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Evaluasi Efektivitas Penerimaan

2.1. Responsivitas

Indikator responsivitas digunakan untuk mengetahui kemampuan dan respon pihak DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan penerimaan

atau pemungutan pajak kendaraan bermotor, bagaimana kinerja DPPAD dalam mengenali, merespon dan memenuhi tuntutan wajib pajak yaitu pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya pihak DPPAD, JasaraharjadanSamsatsebagai pihak yang mengelolapajak kendaraan bermotor harus mampu menanggapi berbagai keluhan atau saran parawajib pajak, mungkin salah satunya tentang sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor itu sendiri, hal ini disampaikan oleh Bapak Suryo Winanto selaku petugas pemungut pajak :

“ Kalau kendalanya sih ga ada yang berarti sih mbak, kan sistemnya sudah teratur, paling juga kalau pada mau bayar gitu suka ada yang kesusu, pengen cepet-cepet ga mau nunggu prosesnya, ya pada pakai calo gitu mbak, tapi alhamdulillah sekarang calo udah berkurang mbak, karena pelayanan disini juga sudah dimaksimalkan”(wawancara 15 Mei 2015 Pukul 10.00 WIB)

Dari keterangan narasumber diatas bisa disimpulkan bahwa tidak ada kendala yang serius dari dalam kantor atau dari petugas pemungut pajak, namun kendala muncul memang dari wajib pajak itu sendiri, wajib pajak masih banyak yang malas membayar pajak atau telat membayar pajak dikarenakan antriannya yang sangat panjang serta prosesnya yang cukup menguras waktu mereka. Sebenarnya toleransi sudah diberikan oleh pihak DPPAD, segala aturan yang paten seolah dibuat menjadi fleksibel namun tetap saja kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor belum tumbuh juga. Jika hal ini tidak ditanggapi atau tidak diserpon secara serius oleh DPPAD, selamanya pemungutan pajak kendaraan bermotor akan dinilai kurang efektif. Kadang kesadaran yang dimiliki wajib untuk membayar pajak sangatlah kurang, banyak wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak dikarenakan kurang diresponnya aspirasi-aspirasi mereka oleh pemerintah sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

2.2 Responsibilitas

Responsibilitas adalah kemampuan yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggara pemerintah dengan hukum, peraturan dan prosedur, yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor apakah sudah sesuai dengan peraturan dan sistem yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh DPPAD sendiri menggunakan sistem *Official Assessment System*. Dimana *Official Assessment System* ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dengan mengeluarkan Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Dalam pemungutan pajak memang dilakukan dengan dasar undang-undang sebagai landasan hukum yaitu perda pajak kendaraan bermotor, dalam kenyataannya pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dijalankan oleh pihak DPPAD sudah mematuhi perda yang berlaku, inilah yang membuat pemungutan pajak kendaraan tidak mengalami banyak kendala yang serius dalam proses pemungutannya. Pemungutan yang dilakukan memang harus sesuai perda yang berlaku, hal ini dilakukan agar wajib pajak mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan mengerti sanksi apa saja yang diberikan kepada wajib pajak jika mangkir atau telat membayar pajak.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pajak dan BBN-KB DPPAD Bapak Nashib seperti berikut :

“Ada sanksi khusus untuk wajib pajak yang mangkir atau telat membayar pajak, jadi apabila wajib pajak itu terlambat kita kenakan sanksi 2% perbulan, ya dikenakan sanksi 2% perbulan dan apabila dia sampai setahun ya batasnya hanya 24% aja sanksinya itu” (wawancara 13 Mei 2015 Pukul 12.31 WIB).

Memang sanksi-sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang mangkir sudah dijelaskan dalam petunjuk teknis dan undang-undang. Namun sayangnya untuk masalah pemberlakuan sanksi berat seperti penyitaan kendaraan bermotor terhadap wajib pajak yang terlambat bayar tidak bisa dilakukan begitu saja oleh pihak DPPAD dikarenakan pihak DPPAD merasa masyarakat tidak akan siap dan masyarakat pasti menolak penyitaan tersebut dengan berbagai alasan, juga dikarenakan faktor kemanusiaan, di tambah lagi masyarakat kemungkinan besar akan memandang buruk pemerintah jika penyitaan ini dilakukan oleh pihak terkait. Maka dari itu pihak DPPAD belum begitu tegas untuk melaksanakannya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa responsibilitas DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor belum optimal, walaupun, sanksi-sanksi ringan yang telah tertulis di perda sudah dilakukan secara maksimal dan penetapan tarif sanksi yang diberikan sudah dilaksanakan secara tegas, tetap saja pihak DPPAD belum bisa melaksanakan sanksi berat berupa penyitaan kendaraan bermotor yang menunggak dikarenakan pihak DPPAD masih belum berani menerima resiko-resiko yang muncul jika pihaknya menerapkan sanksi tersebut.

2.3 Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor ditandaidengan terselenggarakannya koordinasi yang cukup baik antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara wajib pajak dengan pihak pengelolaan pajak kendaraan bermotor yaitu DPPAD, Jasaraharja serta Samsat (sebagai pihak yang menjadi mitra DPPAD dalam menangani masalah pemungutan pajak kendaraan bermotor), ini terbukti pihak DPPAD mempublikasikan seluruh laporan hasil pemungutan pajak yang diberikan dari pihak pemungut pajak terhadap wajib pajak yang ingin mengetahui pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah yang bias diakses secara mudah melalui website.

Selama ini penulis yang juga sebagai wajib pajak tidak pernah menemui hambatan apapun dalam proses pembayaran pajak di Samsat, karena tariff pajak kendaraan bermotor sendiri juga sudah ditentukan oleh DPPAD dan kita sebagai wajib pajak hanya diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang tertera pada STNK.

Dari wajib pajakpun kalau untuk masalah pajak selalu ditegaskan, karena menurut wajib pajak sendiri untuk membangun pertumbuhan fasilitas di Provinsi Jawa Tengah semuanya harus jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi masalah realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor ini. Bentuk transparansi yang diberikan oleh DPPAD yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak biasanya melalui website yang dikelola oleh DPPAD. Seperti yang diungkapkan Bapak Nashib sebagai berikut :

“Transparansinya? Ya transparansinya ya ono to mbak nah itu kan kita memampang berapa sih yang harus dibayar, umpamanya kan ada untuk STNK sekian untuk kendaraan baru sekian jadi kita menentukan tarifnya disana, tarif resminya juga ada gitu, untuk realisasinya kita juga ngefloorn kemasyarakat itu loh di websitenya dilihat jadi semarang 1 itu berapa semarang 2 itu berapa semua UP3AD sudah ada di website DPPAD, terus yang mbaknya kemarin pinjam itu kan juga ada sampai desember itu kan berapa itu kan juga bisa dilihat”(wawancara 13 Mei 2015 Pukul 12.31 WIB).

Bentuk transparansi yang dilakukan oleh DPPAD dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat biasanya dilakukan pada akhir periode yang akan dibuat berupa laporan-laporan APBD yang kemudian akan dipublikasikan oleh DPPAD melalui media cetak dan selain melalui media cetak, pihak DPPAD juga mempublikasikan lewat media elektronik melalui internet dengan cara mengunjungi website DPPAD Provinsi Jawa Tengah.

Menurut penuturan narasumber tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa transparansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah sudah cukup baik, ini terlihat dari keterbukaan DPPAD dalam mempublikasikan realisasi pajak tiap tahunnya dan mempermudah wajib pajak untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui layanan-layanan yang diberikan. Kepercayaan yang tumbuh dari wajib pajak terhadap SAMSAT maupun DPPAD terus ditingkatkan dengan upaya mensosialisasikan hasil perolehan pendapatan pajak di dalam APBD di akhir tahun baik di media cetak maupun media elektronik.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas DPPAD Provinsi Jawa Tengah didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan terhadap wajib pajak kepada atasan dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Pertanggungjawaban langsung dilaporkan kepada kepala dinas DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Nashib sebagai berikut :

“Jadi kan gini tanggungjawab penerimaan pajak di daerah kan daerah dulu ya, daerah itu tanggungjawab kasi PKB namanya kasi Pajak dan BBNKB itu kan pada Samsat 1 2 dan 3 ada masing masing, mereka itu nanti setiap bulan melaporkan ke bidang pajak nah kita menghimpun seluruh laporan mereka se Jawa tengah gitu ya nanti tanggungjawabnya ya adanya di UP3AD sebenarnya, kita kan hanya menghimpun dan mengolah datanya saja.” (wawancara 13 Mei 2015 Pukul 12.31 WIB).

Dari pemaparan diatas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah dan Samsat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai porsinya dan bidangnya masing-masing, dan dalam proses ini tidak ada hambatan sama sekali. Jika sudah diserahkan kepada bendahara penerima kemudian diserahkan ke kas daerah dalam hal ini Bank Jateng adalah pihak yang terkait maka proses ini selesai. Selanjutnya tinggal pihak DPPAD membuat laporan pertanggungjawaban ke Gubernur Jawa Tengah dalam setiap bulan dan laporan ini harus masuk. Semisal target yang akan dicapai dalam satu tahun adalah 1M maka realisasinya pada setiap bulan bisa terpantau harus dapat berapa dan itu bisa diprediksi.

2.5 Produktivitas

Dari hasil pengelolaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2010-2014 setelah melalui tahap pengumpulan dan pelaporan lewat APBD diakhir periode dapat diketahui realisasi dari target yang telah ditetapkan oleh pihak DPPAD melalui rapat dewan. Seperti tabel di bawah ini adalah hasil pengelolaan melalui perhitungan sederhana yaitu tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase	Kriteria
2010	1.305.000.000.000,00	1.544.313.644.030,00	118,34%	Sangat Efektif
2011	1.650.000.000.000,00	1.755.017.905.667,00	106,36%	Sangat Efektif
2012	1.915.000.000.000,00	2.024.106.323.231,00	105,70%	Sangat Efektif
2013	2.153.912.000.000,00	2.330.853.999.740,00	108,21%	Sangat Efektif
2014	2.476.750.000.000,00	2.587.269.029.100,00	104,46%	Sangat Efektif
Rata-rata			108,61%	Sangat Efektif

Sumber : Biro Keuangan Bag.Pengelolaan Kasda Provinsi Jawa Tengah dan DPPAD Bidang Lahtabang, Diolah.

Dari tabel 3.1 yang ditampilkan diatas dapat kita gali informasi yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata dari tahun 2010-2014 sebesar 108,61%, jika berdasarkan pada kriteria atau indikator yang sudah di tentukan tersebut maka penilaiannya tingkat efektivitas target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2010-2014 bisa dikatakan sangat efektif. Bahkan dengan adanya peningkatan target pemungutan Pajak Daerah setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap mampu mencapai target pemungutan yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2010 target

pemungutan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar Rp. 1.305.000.000.000,- dengan tingkat efisiensi sebesar 118,34%, target ini meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp, 2.476.750.000.000,00, dengan tingkat efisiensi sebesar 104,46% dan setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mampu melampaui target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditentukan. Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa tingkat efektivitas pertahun adalah 108,61%, hal ini menggambarkan secara rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah sangat efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berhasil dalam mengelola pajak kendaraan bermotor.

Jadi memang dari dipihak DPPAD sendiri harus dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah tiap tahunnya. Target terus dinaikan namun pihak DPPAD tetap percaya diri dan tetap optimis untuk memenuhi target tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nashib sebagai berikut :

“Kita ya harus yakin targetnya harus terpenuhi harus yakin kalo ga yakin dulu ya ga bisa kan harus yakin dulu, ya yang pertama kita harus yakin dulu kita bisa untuk aaa bawasannya walaupun kita dikasi target berapa aja kita harus yakin dulu tapi kan nanti ada pertimbangan2 yang harus dipertengahan perjalanan nanti kan ada pertimbangan2 yang harus menggiring kita itu pajak harus diturunkan atau dinaikkan kan gitu itu yang targetnya ya itu nah nanti itu kita ada yang namanya target perubahan itu mau dinaikkan atau diturunkan kita kan juga membuat database2 ibaratnya itu sudah kerjasama dengan undip dengan mana mana nah itu jadi dikoreksi sama mereka, bener ga nanti sekian sekian sekian bisa ndak 5 tahun kedepan bisa ndak kan gitu”(wawancara 13 Mei 2015 Pukul 12.31 WIB).

Kepercayaan diri para pegawai DPPAD dan Samsat tidak muncul begitu saja namun ada proses yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kepercayaan diri para pegawai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa tengah selama tahun 2010-2014 di Jawa Tengah Sudah tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berada diatas 100% dari target yang telah ditentukan, namun demikian dari segi proses belum tergolong efektif hal ini menyebabkan terjadinya penurunan terhadap realisasi penerimaan tersebut pada tahun 2014. Faktor faktor yang menyebabkan adanya penurunan tersebut akan dijelaskan dalam sub bab berikutnya.

3. Faktor Faktor yang mempengaruhi

Dari hasil penelitian penulis, dapat diidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah Hambatan yang muncul biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, hambatan-hambatan yang ditemui adalah hambatan eksternal atau hambatan dari luar yaitu pada wajib pajak sendiri .Berikut ini akan

dijelaskan beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Jawa Tengah.

1. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi sebenarnya bukan hambatan yang berarti dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, jika uang yang harus dibayarkan untuk membayar pajak lebih rendah daripada penghasilan yang diperoleh secara rutin setiap bulannya. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang memiliki gaya hidup yang tinggi seperti ingin memiliki kendaraan pribadi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang kurang begitu penting, namun disisi lain masyarakat ini memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kondisi perekonomian yang tidak stabil inilah yang membuat masyarakat menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum salah satunya selalu lalai untuk membayar pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan tertib dan disiplin. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi tanggungjawabnya melunasi pajak serta memahami fungsi penting pajak bagi kesejahteraan suatu daerah. Pada jaman yang semakin maju ini nampaknya tidak dibarengi dengan kemajuan masyarakat agar sadar untuk mentaati pajak, banyak masyarakat yang lalai atau bahkan enggan membayar pajak kendaraan bermotor padahal sudah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka.

3. Maraknya Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor.

Kasus pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor yang menghambat jalanannya pemungutan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah, banyaknya kendaraan bermotor yang hilang akan menambah tunggakan pajak bagi si pemilik kendaraan, apalagi jika pemilik kendaraan tersebut tidak melaporkan kasus kehilangan ini ke pihak yang berwajib. Walaupun kendaraan bermotor sudah berpindah tangan, namun jika pemilik kendaraan bermotor yang sebenarnya tidak melapor, maka pajak kendaraan tersebut tetap akan aktif dan hutangpun semakin menumpuk di pihak wajib pajak menjadi tunggakan yang harus dilunasi oleh wajib pajak walaupun pada kenyataannya kendaraan tersebut sudah tidak ada di tangan wajib pajak.

4. Program *Low Cost Green Car* (LCGC).

Program *Low Cost Green Car* ini secara langsung berdampak pada keuangan negara, dalam hal ini pendapatan negara dari pajak. Program

LCGC memberikan insentif berupa pemotongan PPnBM sebesar 10%, hal ini menunjukkan bahwa mobil LCGC yang berupa MPV membayar PPnBM sebesar 0%. Pemberian insentif ini otomatis berdampak pada pengurangan pendapatan negara dari pajak.

5. Tidak Adanya Pertumbuhan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Seperti yang kita ketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor, jika melihat tingginya laju pertumbuhan penduduk maka bisa dipastikan tingkat penggunaan kendaraan bermotor sebagai objek pajak juga ikut meningkat karena kebutuhan transportasi sangatlah penting untuk menunjang kinerja masyarakat. Namun pada kenyataannya potensi pajak ini belum bisa digali dengan baik, ini dikarenakan adanya wajib pajak lupa untuk melaporkan objek pajaknya ke kantor pajak dan adanya wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor baru yang masih menggunakan identitas pemilik kendaraan yang lama karena masih enggan untuk melakukan bea balik nama kendaraan bermotor. Ini yang menyebabkan tidak adanya pertumbuhan objek pajak kendaraan bermotor dan berdampak pada kurangnya sumber dana untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan penambahan jumlah kendaraan, sehingga yang terjadi adalah kemacetan yang sangat parah diberbagai titik dan otomatis akan mengganggu kenyamanan berkendara.

KESIMPULAN

Jika dilihat melalui pendekatan sasaran (*goals approach*), dapat ditarik kesimpulan secara rata dalam kurun waktu 2010-2014, realisasi yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah adalah sebesar 108,61 %, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tersebut sangatlah efektif karena Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah mampu memperoleh hasil atau *output* yang melebihi rencana atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun jika dilihat melalui pendekatan proses, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asli Daerah Jawa Tengah belum memenuhi kriteria kinerja yang efektif, bisa dikatakan demikian karena ada beberapa indikator yang menggambarkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah tidak dapat merespon secara cepat kebutuhan dan tuntutan wajib pajak, salah satunya tuntutan wajib pajak akan sarana prasarana yang layak yang dapat menunjang peningkatan fasilitas pelayanan pajak, selain itu tanggung jawab Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor juga belum optimal. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah belum bisa melaksanakan secara tegas sanksi penytian kendaraan bermotor wajib pajak yang menunggak selama bertahun-tahun, dikarenakan pihak DPPAD masih belum berani menerima resiko-resiko yang

muncul seperti pandangan negatif ataupun berkurangnya kepercayaan wajib pajak jika pihaknya menerapkan sanksi tersebut. Ditambah lagi dengan adanya faktor-faktor lain yang dinilai menjadi hambatan yang cukup serius bagi pemerintah maupun dinas terkait untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan pajak kendaraan bermotor.

- Saleh, Ismail, 1988, *Ketertiban dan Pengawasan*. Jakarta : PT Inti Idayu Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P., 1990, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*, Jakarta : Bayumedia.
- Soemitro, Rochmad, 1994, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: PT. Erisco Bandung,
- Sunarso, H. Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3.
- Utami, Ayu Triani. 2014. *ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas ,2005, *Perpajakan Indonesia, Edisi revisi. Buku 1*. Jakarta : Salemba 4.
- Wokas, Hasannudin Heince R. N. 2013. *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI MALUKU UTARA*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- www.tenagasosial.com/2014/05/makalah-konsep-akuntabilitas-dan.html?m=1 Diunduh hari minggu, 21 Juni 2015, Pukul 10.00
- www.manajemenkinerja.com/2011/11/cara-menentukan-dan-memilih-indikator-kinerja-kunci/ Diunduh hari Senin, 8 mei 2015, Pukul 00.45.